



Lamongan
Megilan



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN**

@dinsos.lamongan



dinsos@lamongankab.go.id



dinsos.lamongankab.go.id



KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan. Sebagai implementasi dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat Renja Perubahan, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan tahun 2025.

Renja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi personil di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam menyusun prioritas-prioritas program dan kegiatan pada tahun 2025, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat terpenuhi seluruhnya.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Lamongan yang sejahtera dan lebih baik.

Lamongan, 29 Juli 2025



FARAH DAMAYANTI ZUBAIDAH, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19730509 199803 2 005

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	8
Tabel 2.1.....	10
2.2 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	22
Tabel 2.2.....	23
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 24
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja	24
3.2 Program dan Kegiatan	32
Tabel 3.1	
 BAB IV PENUTUP	 43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah yang mengacu pada RKPD. Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Selanjutnya Renja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025 sebagai tahapan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan operasional dari Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025 adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Lamongan bidang Perencanaan diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa

- Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;

19. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2021 tentang kedua atas tentang Pembentukan ;
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025.

1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Lamongan berdasarkan rancangan awal RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Dinas Sosial Kabupaten Lamongan tahun 2025.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Renja adalah sebagai pedoman :

- 1) Pelaksanaan Perangkat Daerah;
- 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) Penyusunan perubahan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamongan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini memuat :

- 1.1 Latar belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat
- 2.2 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025;
- 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat :

- a. Kesimpulan
- b. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- c. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- d. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fahtor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

Pada Tahun 2025 total anggaran Dinas Sosial Kabupaten Lamongan sebesar **Rp. 21.182.754.359,-** dengan rincian :

- I. Belanja Operasi sebesar **Rp.21.173.522.859,-** meliputi :
 1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.657.079.759,-
 2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 14.409.543.100,-

3. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 3.106.900.000,-

II. Belanja Modal sebesar **Rp. 9.231.500,-** meliputi :

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 9.231.500,-

yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kab. Lamongan Tahun 2025 mempunyai :

1. 7 Program (1 Program Penunjang dan 6 Program Teknis),
2. 13 Kegiatan (6 Kegiatan Penunjang dan 7 Kegiatan Teknis),
3. 48 Sub Kegiatan (19 Sub Kegiatan Penunjang dan 29 Sub Kegiatan Teknis).

Dari jumlah dana tersebut terealisasi tribulan II sebesar **Rp.3.768.730.195,-** dengan capaian kinerja keuangan sebesar **17,79%**.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2025 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja tahun 2025 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Bappeda Periode 2021-2026, dikarenakan Rencana Kerja 2025 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat daerah tahun 2025 dan pencapaian Renstra Bappeda Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025

Indikator dan Target Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Nilai SAKIP Dinas Sosial.
3. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)			
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6+12				14 = 13/5 x 100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1.	Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	100%	3,218,714,900	100%	20,978,130,600	100%	3,284,000,000	100%	663,100,000	100%	694,800,000					100%	1,357,900,000	100%	22,336,030,600	100%	22,336,030,600	#REF!			
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	jumlah PSKS yang berkembang	191 orang	3,218,714,900	701 orang	20,978,130,600	701 orang	3,284,000,000	191 orang	663,100,000	188 Orang	694,800,000					188 orang	1,357,900,000	191 orang	22,336,030,600	191 orang	22,336,030,600	7			
		Peningkatan Kemampuan Pekerja Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Potensi Sosial	30 Orang	13,150,000	30 Orang	2,416,500	30 Orang	10,000,000	30 Orang	-	30 Orang	-					30 Orang	-	30 Orang	2,416,500	30 Orang	2,416,500	0			

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	25 Orang	187,215,400	25 orang	211,250,000	25 orang	173,000,000	25 orang	10,600,000	22 orang	42,300,000					22 orang	52,900,000	25 orang	264,150,000	25 orang	264,150,000	1
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	0	-	5 Keluarga	17,723,464,100	5 Keluarga	10,000,000	0	-		-					0	-	0	17,723,464,100	0	17,723,464,100	#DI V/0!
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	136 Orang (40 LKS & 96 kartar)	3,018,349,500	513 orang (39 LKS & 474 kartar)	3,031,000,000	(40 LKS & 1 kartar)	3,081,000,000	40 Orang (40 LKS)	652,500,000	40 orang (LK S) & 96 kartar	652,500,000					40 Orang (40 LKS) & 96 kartar	1,305,000,000	40 Orang (40 LKS)	4,336,000,000	40 Orang (40 LKS)	4,336,000,000	1
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kabupaten/kota	0	-	5 Sertifikat	10,000,000	5 Sertifikat	10,000,000	0	-		-					0	-	0	10,000,000	0	10,000,000	#DI V/0!
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase korban tindak kekerasan yang tertangani	100%	10,000,000	100%	14,020,000	100%	10,000,000	100%	2,250,000	100%	1,680,000					100%	3,930,000	100%	17,950,000	100%	17,950,000	2
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	Persentase korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	100%	10,000,000	100%	14,020,000	100%	10,000,000	100%	2,250,000	100%	1,680,000					100%	3,930,000	100%	17,950,000	100%	17,950,000	2

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

	Facilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal kewenangan kabupaten/kota	50 Orang	10,000,000	50 Orang	14,020,000	38 Orang	10,000,000	14 Orang	2,250,000	15 orang	1,680,000					29 Orang	3,930,000	14 Orang	17,950,000	14 Orang	17,950,000	2
	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase PPKS yang mendapatkan pelayanan dan direhabilitasi	100%	242,659,500	100%	563,600,000	100%	310,000,000	105%	3,000,000	100%	27,689,300					100%	30,689,300	100%	594,289,300	100%	594,289,300	2
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	242,659,500	100%	563,600,000	100%	310,000,000	105,24%	3,000,000	100%	27,689,300					100%	30,689,300	100%	594,289,300	100%	594,289,300	2
	Penyediaan Permakanan	jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	670 orang	144,942,000	1000 orang	190,000,000	1000 orang	200,000,000	0	-	-	405,500					0	405,500	0	190,405,500	0	190,405,500	1
	Penyediaan Sandang	jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/kota	45 orang	22,581,000	500 orang	195,000,000	50 orang	25,000,000	45 Orang	-	-	20,007,500					45 Orang	20,007,500	45 orang	215,007,500	45 orang	215,007,500	10

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

	Penyediaan Alat Bantu	jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	2 Orang	10,488,500	5 Orang	26,000,000	2 Orang	10,000,000	-	-	-	-				0	-	0	26,000,000	0	26,000,000	2
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	10 Orang	22,971,000	25 Orang	35,000,000	15 Orang	20,000,000	20 orang	3,000,000	12 orang	6,226,300				32 Orang	9,226,300	20 Orang	44,226,300	20 Orang	44,226,300	2
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	5,540,000	10 Orang	45,000,000	10 Orang	8,000,000	-	-	-	-				0	-	0	45,000,000	0	45,000,000	8
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	jumlah peserta bimbingan sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	6,236,000	15 Orang	25,000,000	10 Orang	8,000,000	-	-	-	-				0	-	0	25,000,000	0	25,000,000	4
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan.	jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan	5 Orang	4,250,000	5 Orang	5,000,000	5 Orang	5,000,000	-	-	3 orang	-				3 orang	-	0	5,000,000	0	5,000,000	1

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

		Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak bagi penyandang disabilitas kewenangan kabupaten/kota																				
		Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	2,521,000	5 Orang	5,000,000	5 Orang	5,000,000	1 Orang	-	5 orang	-				5 Orang	-	1 Orang	5,000,000	1 Orang	5,000,000	2
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	4,579,000	5 Orang	5,000,000	5 Orang	5,000,000	13 Orang	-	16 orang	-				16 Orang	-	13 Orang	5,000,000	13 Orang	5,000,000	1
		Pemberian Layanan Kedaruratan	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	6,960,000	5 Orang	6,000,000	5 Orang	5,000,000	1 Orang	-	2 orang	1,050,000				2 Orang	1,050,000	1 Orang	7,050,000	1 Orang	7,050,000	1
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	10 Orang	8,041,000	25 Orang	17,600,000	15 Orang	14,000,000	7 Orang	-	21 orang	-				21 Orang	-	7 Orang	17,600,000	7 Orang	17,600,000	2
		Pemberian layanan rujukan	jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	3 Orang	3,550,000	5 Orang	9,000,000	5 Orang	5,000,000	2 orang	-	6 orang	-				6 Orang	-	2 Orang	9,000,000	2 Orang	9,000,000	3

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase PPKS yang terlayani perlindungan dan jaminan sosial	100%	12,972,571,700	100%	1,824,651,300	100%	8,624,999,700	100%	52,600,000	100%	256,053,800				100%	308,653,800	100%	2,133,305,100	100%	2,133,305,100	0
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	persentase data fakir miskin yang dikelola	100%	12,972,571,700	100%	1,824,651,300	100%	8,624,999,700	100%	52,600,000	100%	256,053,800				100%	308,653,800	100%	2,133,305,100	100%	2,133,305,100	0
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang di data	654.426 Orang	47,654,400	654.426 Orang	84,782,750	654.426 Orang	75,000,000	654.426 Orang	4,000,000	5.500 orang	6,000,000				5.500 orang	10,000,000	654.426 Orang	94,782,750	654.426 Orang	94,782,750	2
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	610.058 keluarga	9,900,000	564.772 Keluarga	12,540,000	600.000 Keluarga	15,000,000	610.058 keluarga	-	-	3,495,000				3,495,000	610.058 keluarga	16,035,000	610.058 keluarga	16,035,000	2	
		Fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	44.819 Keluarga	12,416,031,100	48.995 Keluarga	220,328,550	48.819 Keluarga	8,010,000,000	0	-	-	64,408,800				0	64,408,800	0	284,737,350	0	284,737,350	0
		Fasilitas bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	184 Orang	498,986,200	320 orang	1,507,000,000	170 orang	524,999,700	17 Orang	48,600,000	49 orang	182,150,000				66 Orang	230,750,000	17 orang	1,737,750,000	17 orang	1,737,750,000	3
2.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal Perangkat Daerah Dinas Sosial	83.30%	4,459,014,259	83.20%	4,959,971,650	83.30%	4,876,331,650	-	#####	#####						2,031,433,695	####	6,991,405,345	83.30%	6,991,405,345	2

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	18 dokumen	75,496,000	17 dokumen	85,000,000	17 dokumen	92,500,000	12 dokumen	5,590,700	16 dokumen	-					16 dokumen	5,590,700	10 dokumen	90,590,700	10 dokumen	90,590,700	1
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	8 dokumen (Renstra, rencana perubahan, rencana tahun n+1, perjanjian kinerja, program kerja, perencanaan reformasi birokrasi, IKU, IKI)	8,743,800	7 dokumen (renja perubahan, renja tahun n+1, perjanjian kinerja, program kerja, perencanaan reformasi birokrasi, IKU, IKI)	15,000,000	7 dokumen (renja perubahan, renja tahun n+1, perjanjian kinerja, program kerja, perencanaan reformasi birokrasi, IKU, IKI)	15,000,000	7 dokumen (Renstra, rencana perubahan, perjanjian kinerja, program kerja, perencanaan reformasi birokrasi, IKU, IKI)	-	8 dokumen						8 dokumen (Renstra, rencana perubahan, perjanjian kinerja, program kerja, perencanaan reformasi birokrasi, IKU, IKI)	-	7 Dokumen	15,000,000	7 Dokumen	15,000,000	2
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan yang tersusun	10 laporan (LPPD, LKPJ, LKjIP, evaluasi renja tribulan, SAKIP, laporan reformasi birokrasi, SPM, SKM, SPIP, laporan data)	66,752,200	10 laporan (LPPD, LKPJ, LKjIP, evaluasi renja tribulan, SAKIP, laporan reformasi birokrasi, SPM, SKM, SPIP, laporan data)	70,000,000	10 laporan (LPPD, LKPJ, LKjIP, evaluasi renja tribulan, SAKIP, laporan reformasi birokrasi, SPM, SKM, SPIP, laporan data)	77,500,000	5 laporan	5,590,700	8 laporan	-					8 laporan	5,590,700	5 laporan	75,590,700	5 laporan	75,590,700	1

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	29 dokumen	3,691,242,559	29 dokumen	3,690,187,750	29 dokumen	3,863,867,650		836,879,067	22 dokumen	842,385,539				22 Dokumen	1,679,264,606	26 Dokumen	5,369,452,356	26 Dokumen	5,369,452,356	1
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	30/14 orang/bulan	3,657,079,759	30/14 orang/bulan	3,665,187,750	30/14 orang/bulan	3,826,367,650	30/14 orang/bulan	836,879,067	30/14 orang/bulan	831,093,539				30/14 orang/bulan	1,667,972,606	30/14 orang/bulan	5,333,160,356	30/14 orang/bulan	5,333,160,356	1
Koordinasi dan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	jumlah laporan akhir tahun	1 laporan	11,437,700	1 laporan	10,000,000	1 laporan	12,500,000		-		-				-	-	-	10,000,000	-	10,000,000	1
Koordinasi dan penyusunan pelaporan keuangan/bulanan/triwulan/semesteran SKPD	jumlah laporan KIB dan laporan barang pengguna bulanan; jumlah laporan semesteran	14 laporan (Laporan semesteran 2, laporan realisasi fisik dan keuangan 12)	22,725,100	14 laporan (Laporan semesteran 2, laporan realisasi fisik dan keuangan 12)	15,000,000	14 laporan (Laporan semesteran 2, laporan realisasi fisik dan keuangan 12)	25,000,000	4 laporan		8 laporan	11,292,000				8 laporan	11,292,000	4 laporan	26,292,000	4 laporan	26,292,000	1
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian dengan baik	100%	-	100%	27,820,000	100%	-		-	-	-				-	-	100%	27,820,000	100%	27,820,000	
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	jumlah pakaian dinas yang disediakan	55 paket		55 paket	19,600,000	55 paket			-	-	-				-	-	-	19,600,000	-	19,600,000	
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	6 orang		6 orang	8,220,000	6 orang			-	-	-				-	-	-	8,220,000	-	8,220,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan persediaan barang dan jasa yang tepat waktu	12 laporan	78,111,700	12 laporan	130,526,600	12 laporan	105,497,900		17,161,980	-	7,675,100				-	24,837,080	12 laporan	155,363,680	12 laporan	155,363,680	2

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	20 paket	8,908,000	20 paket	10,000,000	20 paket	11,740,000	2 paket	-	-	-					2 paket	-	20 paket	10,000,000	20 paket	10,000,000	1
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	25 paket	8,089,900	25 paket	14,146,100	25 paket	13,106,400	2 paket	-	-	-					2 paket	-	25 Paket	14,146,100	25 Paket	14,146,100	2
Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah bahan logistik yang disediakan	4 Paket	16,759,300	4 Paket	47,543,500	4 Paket	32,200,500	1 paket	-	1 paket	3,575,100					2 paket	3,575,100	4 Paket	51,118,600	4 Paket	51,118,600	3
Penyediaan Barang dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	14 paket	5,000,000	14 paket	13,837,000	14 paket	10,000,000	3 paket	-	5 paket	-					8 paket	-	14 Paket	13,837,000	14 Paket	13,837,000	3
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan, iklan/ucapan	7 Dokumen	10,000,000	7 Dokumen	15,000,000	7 Dokumen	10,000,000	2 dokumen	-	2 dokumen	4,100,000					4 dokumen	4,100,000	7 Dokumen	19,100,000	7 Dokumen	19,100,000	2
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	6 Laporan	29,354,500	6 Laporan	30,000,000	6 Laporan	28,451,000	2 laporan	17,161,980	2 laporan	-					4 laporan	17,161,980	6 Laporan	47,161,980	6 Laporan	47,161,980	2
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100%	9,231,500	100%	115,344,800	100%	20,000,000		-	-	-					-	100%		115,344,800	100%	115,344,800	12
pengadaan mebel	jumlah mebel yang diadakan	5 unit	9,231,500	5 Unit	53,100,550	5 Unit	10,000,000		-	-	-					-	-	5 Unit	53,100,550	5 Unit	53,100,550	6
pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 unit	-	5 Unit	62,244,250	5 Unit	10,000,000		-	-	-					-	-	5 Unit	62,244,250	5 Unit	62,244,250	#DI V/0!
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persentase layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik	100%	470,304,900	100%	641,092,500	100%	631,684,000		153,925,662		149,465,647						303,391,309	100%	944,483,809	100%	944,483,809	2
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	117,000,000	3 Laporan	117,000,000	3 Laporan	117,000,000	1 laporan	22,976,162	-	20,436,522					1 laporan	43,412,684	3 Laporan	160,412,684	3 Laporan	160,412,684	1
penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 Laporan	7,898,900	20 Laporan	14,528,500	20 Laporan	14,920,000	1 laporan	-	1 laporan	-					2 laporan	-	20 Laporan	14,528,500	20 Laporan	14,528,500	2

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

		penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah tenaga kontrak	1 Laporan	345,406,000	1 Laporan	509,564,000	1 Laporan	499,764,000		130,949,500	-	129,029,125				-	259,978,625	1 Laporan	769,542,625	1 Laporan	769,542,625	2
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	134,627,600	100%	270,000,000	100%	162,782,100		9,200,000		9,150,000					18,350,000	100%	288,350,000	100%	288,350,000	2
		peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah pajak surat kendaraan yang terbayarkan (kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional); jumlah mobil jabatan dan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 unit	106,007,600	14 unit	110,000,000	14 unit	102,782,100	5 unit	9,200,000	3 unit	9,150,000				8 unit	18,350,000	2 unit	128,350,000	2 unit	128,350,000	1
		pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	36 unit	8,620,000	36 unit	10,000,000	36 unit	10,000,000		-	-	-				-	-	36 Unit	10,000,000	36 Unit	10,000,000	1
		pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	20,000,000	1 unit	150,000,000	1 unit	50,000,000		-	-	-				-	-	1 unit	150,000,000	1 unit	150,000,000	8
3.	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	107,320,000	100%	186,410,000	100%	150,000,000		-	100%	31,123,400				100%	31,123,400	100%	217,533,400	100%	217,533,400	2
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	100%	94,400,000	100%	102,225,700	100%	126,000,000		-	100%	26,303,400				100%	26,303,400	100%	128,529,100	100%	128,529,100	1
		Penyediaan Makanan	jumlah korban bencana yang mendapatkan paket permakanan	100 orang	37,200,000	125 orang	39,144,500	142 orang	50,000,000	22 orang	-	2 orang	10,966,000				24 orang	10,966,000	22 orang	45,853,900	22 orang	50,110,500	1

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Penyediaan Sandang	jumlah korban bencana yang mendapatkan paket sandang	57 orang	36,920,000	80 orang	34,887,900	80 orang	50,000,000	12 orang	-	1 orang	13,698,900				13 orang	13,698,900	12 orang	19,824,900	12 orang	48,586,800	1
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1 unit	4,180,000	1 unit	6,126,000	1 unit	7,000,000	0	-	-	703,500				0	703,500	0	14,639,000	0	6,829,500	4
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	30 Orang	10,000,000	41 Orang	13,935,500	29 Orang	10,000,000	0	-	-	-				0	-	0	8,131,800	0	13,935,500	1
Pelayanan Dukungan Psikososial	jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	75 Orang	6,100,000	100 Orang	8,131,800	100 Orang	9,000,000	0	-	75 orang	935,000				75 orang	935,000	0	85,119,300	0	9,066,800	14
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	100%	12,920,000	100%	84,184,300	100%	24,000,000	100%	-	100%	4,820,000				100%	4,820,000	100%	89,004,300	100%	89,004,300	7
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Siaga Bencana	jumlah kampung siaga yang dibentuk	1 Kampung	5,120,000	1 Kampung	-	1 Kampung	2,000,000	0	-	-	2,240,000				0	2,240,000	0	2,240,000	0	2,240,000	0
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	jumlah tagana yang aktif dalam pelaksanaan penanggulangan bencana	40 Orang	7,800,000	40 Orang	84,184,300	40 Orang	22,000,000	0	-	40 orang	2,580,000				40 orang	2,580,000	0	86,764,300	0	86,764,300	11
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman makam pahlawan dalam kondisi baik	1 TMP	172,474,000	1 TMP	313,200,000	1 TMP	189,999,489	1 TMP	-		5,000,000				1 TMP	5,000,000	1 TMP	318,200,000	1 TMP	318,200,000	2
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang terpelihara	1 TMP	172,474,000	1 TMP	313,200,000	1 TMP	189,999,489	1 TMP	-		5,000,000				1 TMP	5,000,000	1 TMP	318,200,000	1 TMP	318,200,000	2
Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana TMP yang direhab	0	-	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	-	0	-	-	-				0	-	0	50,000,000	0	100,000,000	#DI V/O!

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah terpeliharanya fasilitas TMP	75 makam	10,000,000	75 makam	50,000,000	75 makam	39,999,489	0	-	-	-				0	-	0	163,200,000	0	50,000,000	16
		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah pengamanan taman makam pahlawan yang dilakukan; jumlah pelaksanaan upacara	2 laporan (HKSN & Hari Pahlawan/Tali Asih)	162,474,000	2 laporan (HKSN & Hari Pahlawan/Tali Asih)	163,200,000	2 laporan (HKSN & Hari Pahlawan/Tali Asih)	150,000,000	0		-	5,000,000				0	5,000,000	0	10,000,000	0	168,200,000	0
				6	21,182,754,359	6	28,839,983,550	6	17,445,330,839		#####		#####				5	3,768,730,195	6	32,608,713,745	6	32,608,713,745	2
Rata-rata capaian kinerja (%)										10	249,101,058	12	289,288,969				22	538,390,028	186.92	4,658,387,678	186.92	4,658,387,678	#DI V/0!
Predikat kinerja																							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya program kemiskinan ekstrim melalui anggaran APBDProv.dengan jumlah penerima bansos sebanyak 930 orang; Adanya program prioritas Bupati Lamongan yaitu Program Kesejahteraan Lansia (ROSELA) bantuan makanan siap makan pada 72 orang dalam 1 tahun di 8 kelurahan.																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pada kasus anak bermasalah dengan hukum (ABH) tidak ditemukannya titik temu diversi (penyelesaian secara kekeluargaan) dimana ada 2 tempat Polres dan Pengadilan yang mana di Polres tidak bisa naik ke Pengadilan untuk dilakukan mediasi; data kemiskinan masih banyak yang tidak tepat sasaran; tidak adanya kendaraan angkut barang ketika pengiriman bantuan bencana dan terjadinya pengungsian serta tidak adanya alat dapur umum ketika terjadinya pengungsian; tidak adanya operasional kegiatan untuk ke lapangan sehingga menjadi hambatan dalam proses verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan sosial serta tidak ada operasional kegiatan sehingga menjadi hambatan dalam melaksanakan monev. TKSK, PSM dan Karang Taruna.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya *):																							

*) Diisi oleh Kepala Bappellitbangda

2.2 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan dari pikir dewan kepada Bidang Pemberdayaan Sosial yang dilakukan oleh Bidang, yang selanjutnya dihimpun oleh Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Sosial untuk di usulkan ke Bappelitbangda selaku pengkoordinasi usulan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (usulan RKPD).

Dinas Sosial sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah di tetapkan. Oleh karena itu, Dinas Sosial dalam hal ini sebagai Dinas yang melayani kebutuhan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan.

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Tabel 2.2
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Lamongan

Nama PD : Dinas Sosial

No (1)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Besaran / Volume (5)	Catatan (6)
1.	Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	1. Jl. Suwoko No. 80 Kel. Tlogoanyar Lamongan 2. Jl. Kusuma Bangsa No. 25 Kel. Sukorejo Lamongan	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya Jumlah PSKS yang berkembang Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	1. 1 Lembaga 2. 1 Lembaga	1. Hibah uang kepada Organisasi Masyarakat Bidang Keagamaan (kurangnya seragam organisasi Karang Taruna Padukarsa) 2. Hibah uang kepada Organisasi Masyarakat Bidang Keagamaan (kurangnya seragam organisasi Karang Taruna Bhakti Mandiri)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta menerjemahkan Sasaran (IKD) yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Periode 2025-2029. Hal tersebut dikarenakan Sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan merujuk pada dokumen RPJMD, maka Misi yang dapat didukung secara langsung yakni Misi I dan Misi IV. Misi I **“Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan”** dan Misi IV **“Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Religius,**

BERBUDAYA DAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN”. Fokus misi pertama adalah terwujudnya pertumbuhan yang inklusif. Ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang bisa memberikan dampak positif pada pembangunan dan bisa diakses serta dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Representasi ketercapaian atau keberhasilan dari misi ini yakni meningkatnya jumlah investasi, meningkatnya produktifitas sektor unggulan dan pengeluaran wisatawan meningkat. Selain itu, Kemiskinan menurun, kesenjangan mengecil, dan pengangguran berkurang, serta ketahanan ekonomi keluarga dan perempuan terjamin. Selain itu kesejahteraan petani dan penanganan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial mengalami peningkatan. Fokus Misi ke IV yaitu peningkatan kesalehan sosial dan pelestarian nilai-nilai kebudayaan bagi masyarakat. Representasi ketercapaiannya yakni meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sikap toleran, solidaritas sosial dan stabilitas ketentraman dan ketertiban lingkungan serta menjaga nilai-nilai budaya lokal.

Hubungan perencanaan yang integratif untuk mencapai tujuan pada Misi I dan IV digambarkan sebagai berikut:



GAMBAR 4.1.1 SASARAN MISI I



GAMBAR 4.1.2 SASARAN MISI IV

Sebagai upaya untuk mencapai Misi I, maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan dengan indikator Persentase Penduduk Miskin , dan untuk mencapai Misi IV, maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal dengan indikator Indeks Kesalehan Sosial. Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi I dan IV RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Cascading* yang disajikan sebagai berikut:



GAMBAR 4.1.3 CASCADING MISI I PADA RPJMD TAHUN 2025-2029



GAMBAR 4.1.4 CASCADING MISI IV PADA RPJMD TAHUN 2025-2029

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Dinas Sosial telah memperhatikan dan mengacu pada cascading Misi I dan IV RPJMD di atas. Adapun Sasaran RPJMD Misi I yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni **“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat”** dengan indikator Persentase PPKS yang Meningkat

Kapasitasnya. Sehingga tujuan dari Dinas Sosial pendukung Sasaran RPJMD Misi I adalah **“Meningkatkan Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”** dengan indikator Persentase PPKS yang Meningkat Kapasitasnya. Sedangkan Sasaran RPJMD Misi IV yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni **“Meningkatnya Solidaritas Masyarakat dalam Bergotong royong”** dengan indikator Nilai Solidaritas. Sehingga tujuan dari Dinas Sosial pendukung Sasaran RPJMD Misi IV adalah **“Meningkatkan Solidaritas Masyarakat dalam Bergotong royong”** dengan indikator Persentase Nilai Solidaritas.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

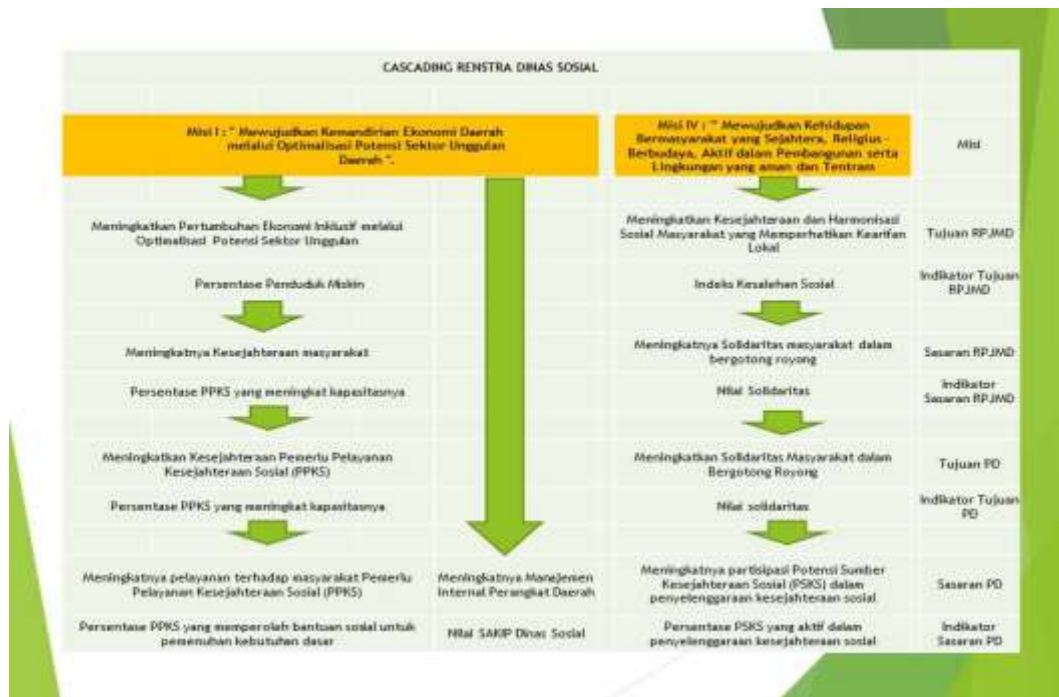
No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD
1	Meningkatkan Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kapasitasnya	1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 2. Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Nilai SAKIP Dinas Sosial
2	Meningkatkan Solidaritas Masyarakat dalam Bergotong royong	Nilai Solidaritas	3. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Adapun *logical framework* tujuan dan sasaran Dinas Sosial dapat dilihat pada gambar berikut:



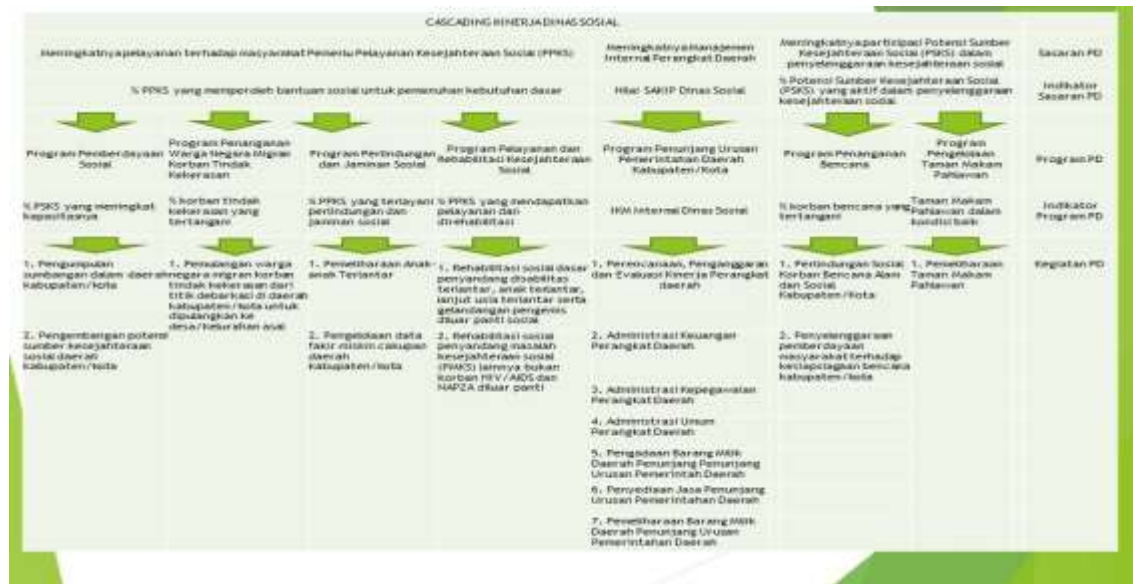
GAMBAR 4.1.5 TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Dinas Sosial dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* yang disajikan sebagai berikut:



GAMBAR 4.2.6 CASCADING RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2025-2029

Adapun Keselarasan Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, Kegiatan serta penanggung jawab pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



GAMBAR KESELARASAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TUJUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	-	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kapasitasnya	3,63%	3,88%	4,13%	4,38%	4,63%	4,88%	4,88%
		1.Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	3,77%	4,04%	4,31%	4,58%	4,85%	5,13%	5,13%
		1. Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah	2.Nilai SAKIP Dinas Sosial	84,77%	84,78%	84,79%	84,80%	84,81%	84,82%	84,82%
2	Meningkatkan Soslidaritas Masyarakat dalam Bergotong royong	-	Nilai Solidaritas	N/A	64,06%	65,66%	67,31%	68,99%	70,71%	70,71%
		2. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	3.Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2 Program Dan Kegiatan

Rumusan perubahan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Telaahan Terdapat Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, adalah :

Prioritas Nasional :

- Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif,

- serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
 - e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 - f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
 - g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
 - h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arah Kebijakan :

- a. Penguatan ideologi Pancasila, kualitas demokrasi, dan penghormatan HAM;
- b. Swasembada pangan, energi, air; penguatan ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru;
- c. Pengembangan infrastruktur, kewirausahaan, industri kreatif, dan agromaritim melalui koperasi;
- d. Penguatan pendidikan, kesehatan, olahraga, kesetaraan gender, serta peran perempuan, pemuda, dan disabilitas;
- e. Hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam untuk nilai tambah dalam negeri;
- f. Pembangunan dari desa, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- g. Reformasi politik, hukum, birokrasi; pencegahan korupsi, narkoba, judi, penyelundupan;
- h. Penyelarasan kehidupan dengan alam dan budaya; peningkatan toleransi antarumat beragama.

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Tabel 3.1
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/pergeseran Alokasi Anggaran			Keterangan
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja Refocusing	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/berkurang	
1					2	3		4		5		6	7	7-6	8
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	21,383,614,358	21,283,585,107	(100,029,251)	
1	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal Perangkat Daerah Dinas Sosial	83.34%	Nilai IKM Internal Perangkat Daerah Dinas Sosial	83.34%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	4,523,183,258	4,559,845,007	36,661,749	
1	06	01	2.01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	18 dokumen	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	18 dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	92,500,000	75,496,000	(17,004,000)	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	15,000,000	8,743,800	(6,256,200)	
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 laporan	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	77,500,000	66,752,200	(10,747,800.00)	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	29 dokumen	jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	29 dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	3,509,659,758	3,792,093,207	282,433,449	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30/14 orang/bulan	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30/14 orang/bulan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	3,472,159,758	3,757,930,407	285,770,649	

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

1	0	0	2.	0	Koordinasi dan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	12,500,000	11,437,700	(1,062,300)	
1	0	0	2.	0	Koordinasi dan penyusunan pelaporan keuangan/bulanan/triwulan /semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/s emesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/s emesteran SKPD	14 laporan (Laporan semester an 2, laporan realisasi fisik dan keuangan n 12)	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/s emesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/s emesteran SKPD	14 laporan (Laporan semesteran 2, laporan realisasi fisik dan keuangan 12)	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	25,000,000	22,725,100	(2,274,900)	
1	0	0	2.	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan persediaan barang dan jasa yang tepat waktu	12 Laporan	jumlah laporan persediaan barang dan jasa yang tepat waktu	12 Laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	95,000,000	81,403,300	(13,596,700)	
1	0	0	2.	0	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 paket	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 paket	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	10,000,000	7,859,200	(2,140,800)	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	25 paket	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	25 paket	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	10,000,000	6,571,300	(3,428,700)	
1	0	0	2.	0	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	25,000,000	18,568,300	(6,431,700)	penambahan Rp.25.000.000,- untuk operasional MPP
1	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	14 paket	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	14 paket	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	10,000,000	8,000,000	(2,000,000)	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7 Dokumen	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7 Dokumen	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	10,000,000	10,000,000	-	
1	0	0	2.	0	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6 Laporan	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6 Laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	30,000,000	30,404,500	404,500	

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

1	0	0	2.		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100%	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	20,000,000	4,420,000	(15,580,000)	
1	0	0	2.	0	pengadaan mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	5 Unit	jumlah paket mebel yang disediakan	5 Unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	10,000,000	4,420,000	(5,580,000)	
1	0	0	2.	0	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	10,000,000	-	(10,000,000)	penambahan untuk belanja printer, komputer
1	0	0	2.		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persentase layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik	100%	persentase layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik	100%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	636,023,500	471,804,900	(164,218,600)	
1	0	0	2.	0	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	117,000,000	117,000,000	-	
1	0	0	2.	0	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 Laporan	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 Laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	10,000,000	9,398,900	(601,100)	
1	0	0	2.	0	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	509,023,500	345,406,000	(163,617,500)	
1	0	0	2.		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	170,000,000	134,627,600	(35,372,400)	
1	0	0	2.	0	peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	14 unit	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	14 unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	110,000,000	106,007,600.00	(3,992,400)	penambahan
1	0	0	2.	0	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	36 unit	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	36 unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	10,000,000	8,620,000	(1,380,000)	

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

1	0	0	2.	0	09	0	9	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	1 unit	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	1 unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	50,000,000	20,000,000.00	(30,000,000)	buat pagar
1	0	0	2					Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	100%	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	100%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	3,230,000,000	3,218,714,900	(11,285,100)	
1	0	0	2.	2.	03			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	jumlah PSKS yang berkembang	191 orang	jumlah PSKS yang berkembang	191 orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	3,230,000,000	3,218,714,900	(11,285,100)	
1	0	0	2.	2.	03	0	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	30 orang	jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	30 orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	20,800,000	13,150,000	(7,650,000)	
1	0	0	2.	2.	03	0	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	25 orang	jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	25 orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	189,200,000	187,215,400	(1,984,600)	penambahan tali asih TKSK (1.250.000 x 27 kec) bulan Juli-Desember 2023
1	0	0	2.	2.	03	0	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	0	jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	0	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	-	-	-	
1	0	0	2.	2.	03	0	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	136 orang	jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	136 orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	3,020,000,000	3,018,349,500	(1,650,500)	

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

1	0	0	2.	0	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kabupaten/kota	0	jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kabupaten/kota	0	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	-	-	-	
1	0	0			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase korban tindak kekerasan yang tertangani	100%	Persentase korban tindak kekerasan yang tertangani	100%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	10,000,000	10,000,000	-	
1	0	0	2.		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	100%	Persentase korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	100%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	10,000,000	10,000,000	-	
1	0	0	2.	0	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal kewenangan kabupaten/kota	50 Orang	jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal kewenangan kabupaten/kota	50 Orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	10,000,000	10,000,000	-	pergeseran rincian kode rekening
1	0	0			Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase PPKS yang mendapatkan pelayanan dan direhabilitasi	100%	Prosentase PPKS yang mendapatkan pelayanan dan direhabilitasi	100%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	276,000,000	242,659,500	(33,340,500)	
1	0	0	2.		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan	100%	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan	100%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	276,000,000	242,659,500	(33,340,500)	

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

							dasarnya diluar panti		dasarnya diluar panti							
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	670 orang	jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	670 orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	150,000,000	144,942,000	(5,058,000)		
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/kota	45 orang	jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/kota	45 orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	25,000,000	22,581,000	(2,419,000)		
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	2 Orang	jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	2 Orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	11,000,000	10,488,500	(511,500)		
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	15 Orang	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	10 Orang	Surabaya	Surabaya	25,000,000	22,971,000	(2,029,000)		
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual. dan Sosial	jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	20 Orang	jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	10,000,000	5,540,000	(4,460,000.00)	Merubah kode rekening dari belanja perjalanan dinas tetap (dalam daerah) menjadi belanja kertas dan fotokopi	

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

1	0	0	2.	0	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	jumlah peserta bimbingan sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	15 Orang	jumlah peserta bimbingan sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	10,000,000	6,236,000	(3,764,000.00)	Merubah kode rekening dari mamin lapangan ke mamin rapat dan belanja jasa administrasi (uangsaku berubah ke kode rekening sosialisasi/uang saku)
1	0	0	2.	0	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan. Akta Kelahiran. Surat Nikah. dan Kartu Identitas Anak	jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak bagi penyandang disabilitas kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak bagi penyandang disabilitas kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	5,000,000	4,250,000	(750,000.00)	
1	0	0	2.	0	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	5,000,000	2,521,000	(2,479,000.00)	
1	0	0	2.	0	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	5,000,000	4,579,000	(421,000.00)	
1	0	0	2.	1	Pemberian Layanan Kedaruratan	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	8,000,000	6,960,000	(1,040,000.00)	
1	0	0	2.	1	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	15 Orang	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	10 Orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	15,000,000	8,041,000	(6,959,000.00)	

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

1	0	0	2.	1	Pemberian Layanan Rujukan	jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	3 Orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	7,000,000	3,550,000	(3,450,000.00)	
1	0	0			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase PPKS yang terlayani perlindungan dan jaminan sosial	100%	Prosentase PPKS yang terlayani perlindungan dan jaminan sosial	100%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	13,023,831,100	12,972,571,700	(51,259,400.00)	
1	0	0	2.		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase data fakir miskin yang dikelola	100%	persentase data fakir miskin yang dikelola	100%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	13,023,831,100	12,972,571,700	(51,259,400.00)	
1	0	0	2.	0	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang di data	654.426 Orang	Jumlah Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang di data	654.426 Orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	75,000,000	47,654,400	(27,345,600.00)	pegeseran kode rekening pada rincian belanja
1	0	0	2.	0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	610.058 Keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	610.058 Keluarga	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	15,000,000	9,900,000	(5,100,000.00)	
1	0	0	2.	0	Fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	44.819 Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	44.819 Keluarga	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	12,423,831,100	12,416,031,100	(7,800,000.00)	penambahan untuk rumah singgah
1	0	0	2.	0	Fasilitas bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	184 orang	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota	184 orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	510,000,000	498,986,200	(11,013,800.00)	
1	0	0			Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	130,600,000	107,320,000	(23,280,000.00)	

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	100%	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	100%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	112,600,000	94,400,000	(18,200,000.00)	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	jumlah orang yang mendapatkan permakanaan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	100 orang	jumlah orang yang mendapatkan permakanaan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	100 orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	50,000,000	37,200,000	(12,800,000.00)	
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten/kota	57 orang	jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten/kota	57 orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	40,000,000	36,920,000	(3,080,000.00)	
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	1 unit	jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	1 unit	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	5,000,000	4,180,000	(820,000.00)	
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota	30 Orang	jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota	30 Orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	10,000,000	10,000,000	-	
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten/kota	75 Orang	jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten/kota	75 Orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	7,600,000	6,100,000	(1,500,000.00)	

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

1	0	0	2.		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	100%	Prosentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	100%	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	18,000,000	12,920,000	(5,080,000.00)	
1	0	0	2.	0	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	jumlah kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	1 Kampung	jumlah kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	1 Kampung	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	8,000,000	5,120,000	(2,880,000.00)	pergeseran kode rekening untuk study banding peningkatan SDM Kampung Siaga Bencana
1	0	0	2.	0	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	40 Orang	jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	40 Orang	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	10,000,000	7,800,000	(2,200,000.00)	pergeseran kode rekening karena salah rekening
1	0	0			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman makam pahlawan dalam kondisi baik	1 TMP	Taman makam pahlawan dalam kondisi baik	1 TMP	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	190,000,000	172,474,000	(17,526,000.00)	
1	0	0	2.		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang terpelihara	1 TMP	Jumlah taman makam pahlawan yang terpelihara	1 TMP	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	190,000,000	172,474,000	(17,526,000.00)	
1	0	0	2.	1	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	0	jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	0	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	-	-	-	
1	0	0	2.	0	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	75 makam	jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	75 makam	Kab. Lamongan	Kab. Lamongan	27,526,000	10,000,000	(17,526,000.00)	

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

1	0	0	2.	0	Pengamanan Taman	jumlah laporan hasil	2 laporan	jumlah laporan hasil	2 laporan (HKSN & Hari	Kab. Lamongan	Kab.	162,474,000	162,474,000	-	
	6	7	01	3	Makam Pahlawan	pengamanan taman	(HKSN &	pengamanan taman	Pahlawan/Tali Asih)		Lamon				
					Nasional Kabupaten/Kota	makam pahlawan	Hari	makam pahlawan			gan				
						nasional	Pahlawa	nasional							
						kabupaten/kota	n/Tali	kabupaten/kota							
							Asih)								

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Lamongan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan adalah Program Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Program Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

RENJA Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Sosial. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA Perubahan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Sosial Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2025, merupakan perencanaan yang sifatnya lebih penanganan. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Sosial Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :

- a. Melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara perubahan Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2025, selanjutnya Renja Perubahan Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PAK dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Lamongan, 11 Juni 2025



**Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lamongan**

[Handwritten Signature]

FARAH DAMAYANTI ZUBAIDAH, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730509 199803 2 005